



Analisis Perbedaan Perspektif dan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pemanfaatan *Open Government Data*

Emigawaty

Informatics Departement, Amikom University Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Email: emigawaty@amikom.ac.id

Abstrak

Layanan sistem pemerintah berbasis elektronik saat ini menjadi tulang punggung dan simpul penting bagi publik untuk menjalankan roda aktivitasnya. Konsep *e-Government* dengan berbagai dampak dan pengaruhnya dalam kurun waktu yang cukup lama telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Penelitian ini menggunakan basis studi literatur dengan tujuan mendefinisikan dan mengklasifikasikan peran, tujuan, dan minat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mencari, mengakses, dan menggunakan ulang kumpulan data (*datasets*) yang tersedia pada portal *Open Government Data* (OGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan data sesuai dengan kategori dan tematik diperlukan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan individu dan latar bisnis mereka masing-masing. Terdapat empat klasifikasi utama dalam hal perspektif pemangku kepentingan, yaitu perspektif birokrasi, perspektif teknologi, perspektif politik, dan perspektif ekonomi. Keempat perspektif ini menjadi basis pengetahuan penting bagi peneliti dan bagi juga sisi pemerintah untuk memotret situasi perkembangan pemanfaatan inisiatif OGD.

Keywords: Perspektif, Peran, Pemangku Kepentingan (*stakeholders*), OGD

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam ruang pemerintahan (*e-Government*) merupakan salah satu cara inovatif bagi pemerintah untuk menawarkan banyak peluang yang secara signifikan dapat meningkatkan penyampaian layanan data dan informasi dan untuk berinteraksi lebih terbuka dengan para pemangku kepentingan. Secara definisi, *e-Government* dapat didefinisikan sebagai transfer informasi dan layanan pemerintah antara pemerintah, masyarakat dan pemasok atau pihak ketiga sebagai pengembangan layanan TIK termasuk penyedia data [1, 2]. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik merupakan keniscayaan bagi pemerintah dalam menciptakan reputasi pemerintah yang bersih dan terbuka [3].



Berkembangnya layanan *e-Government* termasuk penggunaan portal *Open Government Data* (OGD) saat ini memungkinkan untuk menggunakan data yang dihasilkan oleh organisasi publik dan membangun layanan yang secara otomatis menjawab pertanyaan terkait masalah administrasi publik [1, 4]. Dalam hal ini, meskipun data yang dibutuhkan tidak selalu tersedia secara waktu nyata (*real time*) dalam status yang mudah diakses dan digunakan, tetapi tetap memiliki potensi besar untuk memungkinkan layanan baru (*innovation*), meningkatkan kualitas kehidupan warga negara dan membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat lebih baik [5, 6].

Lebih lanjut, salah satu cara moderat dan praktis untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada sektor bisnis dan masyarakat adalah dengan orientasi pemangku kepentingan [7]. Fokus pada orientasi pemangku kepentingan (*citizen or stakeholder*) ini kemudian dibagikan oleh banyak penelitian untuk menganalisis persepsi pengguna layanan *e-Government* dan berdasarkan tujuan penggunaan dan juga ekspektasi dari masing-masing mereka [8]. Lebih spesifik, fokus analisis persepsi pengguna layanan *e-Government* adalah terhadap persepsi dan hubungan antara pemangku kepentingan termasuk linear koordinasi dan konektivitas di antara mereka [5, 9, 10].

Keterbukaan data pemerintah pada sektor publik merupakan salah satu inisiatif besar untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, dan merangsang keterlibatan masyarakat dalam menggunakan kembali kumpulan data atau *datasets* [11]. Disaat yang sama, OGD juga telah menarik perhatian pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan juga tujuan yang heterogen untuk mencari serta menggunakan kembali kumpulan data [8].

Kendatipun demikian, bagaimana pemerintah berinteraksi dengan para pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan dan informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar diinginkan masyarakat belum terdefiniskan dengan baik [7]. Dengan kondisi ini, maka konsekuensinya adalah kurangnya perhatian pada kebutuhan dan pertanyaan warga jika pengguna benar-benar menginginkan jenis dan kategori kumpulan data, atau dapatkah mereka menggunakan data tersebut?

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan perspektif dan peran pemangku kepentingan dalam pemanfaatan OGD. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk memberikan gambaran klasifikasi pemangku kepentingan berikut perspektif dan perannya dalam mencari dan menggunakan ulang kumpulan data yang dapat diakses pada portal OGD. Penelitian ini juga merancang tiga rumusan pertanyaan diantaranya adalah (1) *bagaimana*

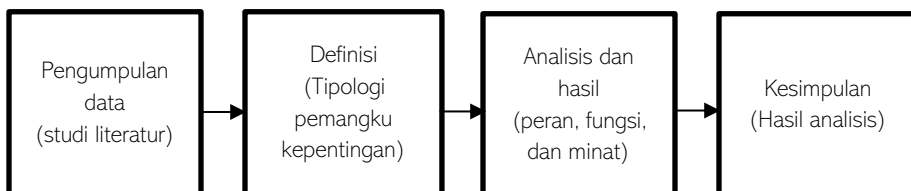
mendefinisikan pemangku kepentingan OGD? (2) bagaimana perspektif masing-masing pemangku kepentingan dalam pemanfaatan OGD? (3) bagaimana mengklasifikasikan peran dan minat masing-masing perbedaan pemangku kepentingan?

Pada penelitian-penelitian terdahulu, telah ada beberapa tulisan yang mencoba untuk memberikan pengetahuan terkait dengan perspektif dan peran pemangku kepentingan dalam memanfaatkan kumpulan data pada portal OGD. Penelitian yang dilakukan oleh Gonzales dkk (2015), misalnya mengklasifikasikan perspektif pemangku kepentingan OGD dalam empat kelompok seperti birokrasi, teknologi, politik, dan juga ekonomi [12]. Hal serupa terkait perspektif pemangku kepentingan juga disampaikan oleh Deo Donald dkk (2018), yang mengklasifikasikan perspektif pemangku kepentingan menjadi lima kelompok, antara lain teknologi, organisasi, keberlanjutan, sosial, dan pengaruhnya [13].

Namun demikian, dari beberapa penelitian yang ada masih sedikit yang memberikan pengetahuan secara spesifik dan lebih fokus pada memetakan peran dan minat masing-masing pemangku kepentingan OGD. Oleh karena itu, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman baru sejauh mana dampak pelaksanaan OGD baik pada sisi peran (*roles*) maupun minat (*interest*) mereka.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memahami berbagai makna yang dianggap berasal dari data pemerintah terbuka dalam konteks tertentu, kita perlu menganalisis siapa yang terlibat dengan OGD dalam konteks itu dan apa perspektif khusus mereka tentang OGD. Secara umum, alur metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Terdapat empat tahapan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi literatur, pendefinisian, analisis dan hasil, dan kesimpulan.



Gambar 1. Diagram alur metode penelitian

2.1. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan adalah hasil penelitian terdahulu terkait dengan perspektif dan peran pemangku kepentingan dalam pemanfaatan portal OGD. Sumber data yang digunakan adalah artikel yang terbit pada kurun waktu 15 tahun terakhir (2007-2022). Penelitian ini menggunakan teknik *rapid systematic literature review* untuk mengumpulkan data dengan waktu yang singkat namun tepat. Setelah melewati tahapan seleksi (*screening*) terhadap sekitar 50 artikel penuh (*full articles*), kemudian dipilih artikel yang paling relevan sebanyak 20 artikel untuk dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Sejumlah artikel yang terpilih ini meliputi beberapa tema, yaitu teori e-Government dan OGD, teori pemangku kepentingan, dan perspektif serta peran pemangku kepentingan dalam pemanfaatan OGD.

2.2. Landasan Teori

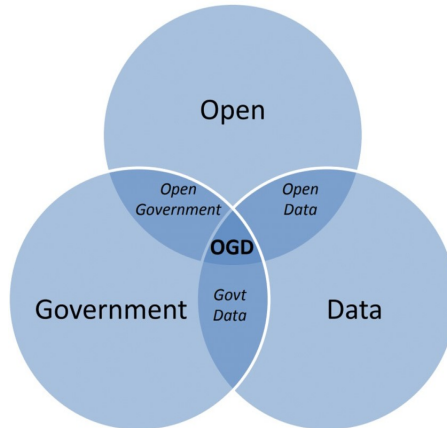
2.2.1 *Open Data* dan *Open Government Data*

Secara definisi, *Open Data* atau keterbukaan data merupakan data yang dapat diakses, digunakan, dan dibagikan oleh siapa saja tanpa adanya restriksi dan biaya sebagai syaratnya [14, 15]. Institusi pemerintah, pelaku bisnis, peneliti dan individu dapat menggunakan data terbuka untuk menghasilkan manfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungannya [16, 17]. Pada dimensi lain, organisasi pemerintah sebagai salah satu simpul penting penyedia dan penyebar data berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya [18]. Dengan situasi ini, pemerintah berharap mendapatkan umpan balik yang berharga dari publik termasuk menjalin hubungan yang lebih intensif (*citizen engagement*).

Open Government Data (OGD) merupakan filosofi dan serangkaian kebijakan yang semakin yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan penciptaan nilai dengan membuat data pemerintah tersedia untuk publik [11]. Dalam hal ini, pemerintah sebagai lembaga formal penyedia data, menghasilkan dan menugaskan sejumlah besar data dan informasi untuk dapat diakses, diunduh, dan digunakan kembali oleh berbagai tipe pengguna data secara bebas tanpa lisensi [19].

Dalam pemahaman lainnya, OGD pada dasarnya adalah tentang penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan meningkatkan pemberian layanan bagi warga negara [20]. Dampak pemanfaatan OGD berpotensi menjangkau jauh untuk pembangunan berkelanjutan dengan pengaruh positif pada inovasi, transparansi, akuntabilitas, tata kelola partisipatif, dan pertumbuhan ekonomi [12]. Gambar 2 merupakan konsep OGD untuk dapat memahami dengan lebih

baik tentang konsep besar diantara tiga irisan domain, yaitu data pemerintah (*government data*), keterbukaan data (*open data*), dan keterbukaan pemerintah (*open government*) [12].



Gambar 2. Teori fundamental *Open Government Data* (OGD) [12]

Pertama, data pemerintah (*government data*) merujuk pada data pemerintah yang berasal dari institusi pemerintah itu sendiri sebagai pengumpul, pengguna, pemegang sekaligus penghasil informasi terkait warga negara, organisasi, ataupun layanan-layanan kepada publik [12]. Catatan penting dari konsep data pemerintah ini adalah bahwa harus ada perlakuan dan perhatian yang khusus adalah bagaimana kumpulan data tersebut dapat dikelola dengan baik dan efektif untuk kepentingan publik [21].

Kedua, data terbuka (*open data*) merupakan sebuah konsep dimana data secara independen atau tidak terikat secara sektoral, namun sumber data berasal dari berbagai transaksi atas inovasi teknologi informasi [18]. Sumber data ini kemudian memiliki peluang yang besar untuk bisa diakses secara luas, disimpan dan digunakan kembali oleh pemangku kepentingan [22]. Dalam radius yang lebih luas, data terbuka memberikan peluang baru bagi institusi pemerintah untuk berkolaborasi dengan warga (*government-citizen collaboration*) [23].

Ketiga, keterbukaan pemerintah (*open government*) merupakan sebuah kepercayaan publik bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah tercipta dengan lebih transparan dan mengedepankan tingkat partisipatif [24]. Dengan mengizinkan publik untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik sistem kerja pemerintah, maka semangat keterbukaan pemerintah dapat meningkatkan partisipasi publik dan menghasilkan kebijakan lebih baik [25].

2.2.2 Prinsip Dasar *Open Government Data*

Berdasarkan Open Government Working Group (OGWG), data publik harus transparan kepada publik, kecuali jika data tersebut berkaitan dengan keamanan nasional, rahasia bisnis, privasi individu, atau masalah lainnya [26, 27]. Untuk dapat menjalankan misi keterbukaan data secara luas dan komprehensif, maka OGWG memformulasikan delapan prinsip utama dari keterbukaan data kepada publik, seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Prinsip-prinsip dasar *Open Government Data*

Nomor	Prinsip	Indikator dan Keterangan
1	Lengkap (<i>Complete</i>)	<ul style="list-style-type: none">▪ Dataset harus tersedia selengkap mungkin termasuk metadata▪ Dataset tidak bertentangan dengan aturan atau regulasi termasuk masalah privasi dan keamanan informasi di dalamnya▪ Meskipun sumber daya informasi non-elektronik, seperti artefak fisik, tidak tunduk pada prinsip OGD, namun penyedia data dianjurkan agar sumber daya tersebut disediakan secara elektronik sejauh sebisa mungkin.
2	Primer (<i>Primary</i>)	<ul style="list-style-type: none">▪ Dataset harus secara bersumber secara primer termasuk informasi asli yang melekat pada data tersebut, bukan dalam bentuk agregat atau modifikasi.▪ Dataset juga menyertakan rincian darimana dan bagaimana dataset tersebut diperoleh▪ Jika suatu entitas memilih untuk mengubah data dengan pendekatan agregasi atau transcoding untuk digunakan di situs Internet. Maka entitas tetap memiliki kewajiban untuk membuat informasi resolusi penuh agar pihak lain dapat menggunakan kembali dataset tersebut.
3	Tepat waktu (<i>Timely</i>)	<ul style="list-style-type: none">▪ Dataset harus tersedia tepat waktu dirilis secepat mungkin▪ Keputusan melepas data disesuaikan dengan tingkat sensitivitas data

Nomor	Prinsip	Indikator dan Keterangan
4	Mudah diakses (<i>Accessible</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dataset dapat diakses dan mudah untuk diperoleh dengan cara yang umum ▪ Mengedepankan aspek kemudahan untuk menavigasi dan menemukan dataset ▪ Data tidak dapat diakses jika hanya dapat diambil melalui formulir web navigasi atau jika alat otomatis tidak diizinkan untuk mengaksesnya karena file robots.txt, kebijakan lain, atau pembatasan teknologi.
5	Dapat diproses mesin (<i>Machine Processible</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dataset tersedia dalam pilihan format yang beragam dan dapat diproses oleh mesin komputer ▪ Tersedia dokumentasi untuk membaca format dataset yang beragam ▪ Kemampuan agar data dapat digunakan secara luas mengharuskan data dikodekan dengan benar
6	Tanpa diskriminasi (<i>Non-discrimination</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengguna data dapat mengakses dataset kapanpun tanpa diminta identitas atau diperlukan jastifikasi dan registrasi untuk mendapatkannya ▪ Akses anonim ke data harus diizinkan untuk data publik, termasuk akses melalui <i>proxy</i> anonim.
7	Tanpa kepemilikan (<i>Non-Proprietary</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kontrol eksklusif ▪ Format berpemilik menambahkan batasan yang tidak perlu tentang siapa yang dapat menggunakan data, bagaimana data dapat digunakan dan dibagikan, dan apakah data dapat digunakan di masa mendatang
8	Tanpa biaya (<i>Lisence-free</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data tidak tunduk pada peraturan hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang apa pun ▪ Pembatasan privasi, keamanan, dan hak istimewa yang wajar mungkin diizinkan.

2.2.3 Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan pandangan kapitalisme yang menekankan hubungan yang saling terkait antara sebuah organisasi baik pemerintah dengan masyarakat ataupun bisnis dan pelanggannya [5]. Beberapa entitas pemangku kepentingan termasuk di dalamnya adalah pemasok, karyawan, investor, komunitas, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam organisasi [28, 29].

Dalam domain pemerintahan, ada situasi dan kesepakatan umum bahwa sektor publik itu kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan [30]. Kompleksitas dalam pemangku kepentingan dalam lingkaran organisasi pemerintahan dicirikan dengan banyak dimensi, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik [10]. Dengan teori pemangku kepentingan ini, ada harapan bahwa baik pemerintah maupun korporasi akan melakukan upaya untuk memitigasi atau mengurangi konflik antar pemangku kepentingan. Teori ini juga menggabungkan kepentingan pihak ketiga mana pun yang memiliki tingkat ketergantungan tertentu pada sebuah organisasi.

Lebih lanjut, keterlibatan pemangku kepentingan mengacu pada proses mengidentifikasi, menganalisis, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, serta memberi mereka kesempatan untuk merespons dan berpartisipasi [13]. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan keterlibatan pemangku kepentingan (khususnya di pemerintahan) meliputi partisipasi publik, keterlibatan masyarakat, konsultasi, partisipasi warga, dan keterlibatan warga [25]. Secara umum, pemangku kepentingan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pertama, *stakeholder* Internal adalah pihak-pihak, individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam manajemen institusi pemerintahan ataupun perusahaan [13]. Mereka dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan entitas karena mereka memiliki kepentingan dalam organisasi. Sementara itu, Pemangku Kepentingan Utama adalah nama kedua dari Pemangku Kepentingan Internal [31].

Kedua, *stakeholder* Eksternal adalah pihak-pihak yang berkepentingan, yang bukan merupakan bagian dari manajemen, tetapi mereka secara tidak langsung dipengaruhi oleh pekerjaan pada institusi pemerintahan ataupun perusahaan [31]. Mereka adalah pihak luar yang merupakan bagian dari lingkungan bisnis. Mereka juga dikenal sebagai *Stakeholder* Sekunder. Mereka adalah pengguna

informasi keuangan pemerintahan/perusahaan, untuk mengetahui kinerja, profitabilitas, dan likuiditasnya, sebagai ilustrasi.

Berikut adalah beberapa perbedaan antara *stakeholder* internal dan eksternal, sebagai berikut [31]:

- 1) Individu atau kelompok yang bekerja untuk organisasi dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pada pemerintahan atau perusahaan dikenal sebagai Pemangku Kepentingan Internal. Pemangku Kepentingan Eksternal, di sisi lain, adalah individu atau kelompok yang tidak dipekerjakan oleh organisasi tetapi mereka terpengaruh oleh aktivitasnya.
- 2) *Stakeholder* Internal melayani organisasi, tetapi *Stakeholder* Eksternal berurusan dengan pemerintahan atau perusahaan secara eksternal.
- 3) *Stakeholder* Internal secara langsung dipengaruhi oleh aktivitas pemerintahan atau perusahaan karena mereka adalah bagian dari organisasi, kebalikan dari *Stakeholder* Eksternal.
- 4) *Stakeholder* internal dipekerjakan oleh pemerintahan atau perusahaan, tetapi stakeholder eksternal tidak.
- 5) Masalah internal perusahaan diketahui oleh pemangku kepentingan internal. Namun, pemangku kepentingan eksternal tidak mengetahui hal tersebut.
- 6) *Stakeholder* Internal adalah pemangku kepentingan utama sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah pemangku kepentingan sekunder.

Selanjutnya, dalam lingkup organisasi pemerintahan dalam hal menggunakan sumber daya dan layanan-layanan sistem berbasis elektronik (*e-Government*), beberapa potret perbedaan antara stakeholder internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan stakeholder internal dan eksternal

No	Parameter Perbedaan	Stakeholder internal	Stakeholder eksternal
1	Makna	Individu dan pihak yang menjadi bagian dari organisasi dikenal sebagai Pemangku Kepentingan Internal.	Pihak atau kelompok yang bukan bagian dari organisasi, tetapi terpengaruh oleh aktivitasnya dikenal sebagai Pemangku Kepentingan Eksternal
2	Sifat dampak	Langsung	Tidak langsung
3	Sifat Individu	Mereka melayani	Mereka dipengaruhi oleh

No	Parameter Perbedaan	Stakeholder internal organisasi	Stakeholder eksternal pekerjaan organisasi
4	Tanggung jawab organisasi terhadap mereka	Memiliki tanggung jawab utama atau primer	Memiliki tanggung jawab sekunder
5	Motivasi	Cenderung membuat keputusan untuk memproduksi dan melayani suatu sistem organisasi	Cenderung untuk berpartisipasi dalam sebuah sistem organisasi
6	Hubungan dengan atasan dan mitra	Model hubungan lebih cenderung hirarkikal	Model hubungan lebih cenderung membentuk jaringan
7	Model adopsi komunikasi antar entitas	Menerapkan sistem komunikasi <i>captive</i>	Menerapkan sistem komunikasi <i>competitive</i>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil analisis berdasarkan studi literatur terkait peran dan minat pemangku kepentingan dalam menggunakan kumpulan data pada sistem OGD. Secara umum, pada bagian hasil terdiri dari beberapa sub-bagian, antara lain (1) klasifikasi peran pemangku kepentingan pada sistem *e-Government*, dan (2) klasifikasi dan Perspektif Peran Pemangku Kepentingan pada OGD.

3.1 Klasifikasi Peran Pemangku Kepentingan pada *e-Government*

Dalam model konseptual mondial, layanan *e-Government* berfokus pada empat pemangku kepentingan primer, yaitu: warga negara, komunitas bisnis, pegawai pemerintah, dan lembaga pemerintah itu sendiri [32]. *E-Government* bertujuan untuk membuat interaksi dengan warga negara, bisnis, pegawai pemerintah, lembaga pemerintah dan pemerintah lainnya menjadi lebih nyaman, ramah, transparan, efisien dan efektif.

Dalam sistem *e-Government*, masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dapat mengajukan permintaan untuk layanan pemerintah tertentu dan kemudian

menerima layanan pemerintah tersebut melalui Internet atau mekanisme sistem komputerisasi. Terkadang, layanan pemerintah disampaikan melalui satu kantor pemerintah atau dikenal dengan layanan satu atap. Dalam kasus lain, transaksi pemerintah diselesaikan tanpa kontak langsung dengan pegawai pemerintah, dengan menghasilkan dokumen secara elektronik (*paperless*).

Untuk mengetahui siapa saja yang memiliki andil atau peran dalam pelaksanaan sistem berbasis elektronik di pemerintahan, maka penelitian ini mengklasifikasikannya untuk memahami dengan lebih mudah tipologi pemangku kepentingan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3, yang dikenalkan oleh Rowley J (2011) [33].

Tabel 3. Tipologi pemangku kepentingan sistem *e-Government*

No	Tipologi <i>stakeholder</i>	Peran
1	Individu sebagai pengguna layanan (<i>people as service users</i>)	Menerima dan menggunakan layanan profesional pada sistem <i>e-Government</i> selama kurun waktu tertentu dengan sub-layanan tertentu (misal: layanan kesehatan, pendidikan, lowongan kerja, dan transportasi)
2	Individu sebagai warganegara (<i>people as citizens</i>)	Menerima layanan pemerintah pada skala yang lebih luas (misalnya: partisipasi pemilihan kepala daerah atau presiden, partisipasi peserta lelang, dan sebagainya). Peran yang lebih besar dari tipologi ini adalah untuk memastikan hasil yang transparan dan konsisten sesuai dengan aturan dan rangkaian proses interaksi dengan sistem pemerintahan.
3	Pelaku bisnis (<i>businesses</i>)	Penggunaan layanan sistem <i>e-Government</i> dapat membantu membuat semua fungsi bisnis menjadi transparan. Semua informasi pemerintah dapat diunggah ke Internet. Para pelaku bisnis secara khusus bisa mengakses informasi apa pun yang mereka inginkan, kapan pun mereka menginginkannya, dengan nyaman.
4	Unit usaha kecil dan menengah (<i>small-to-medium enterprises</i>)	Sistem <i>e-Government</i> membawa banyak manfaat signifikan bagi perusahaan. Digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi dengan menyediakan akses informasi dan komunikasi yang lebih baik dan lebih cepat antara staf,

No	Tipologi <i>stakeholder</i>	Peran
		pemasok, dan jaringan. Ini dapat membantu usaha kecil dan menengah (UKM) berintegrasi ke pasar global.
5	Organisasi non-profit (<i>non-profit organization</i>)	NGO memiliki peran besar pada sistem pemerintahan utamanya pada pekerjaan lingkungan, sosial, advokasi dan hak asasi manusia. Mereka dapat bekerja untuk mempromosikan perubahan sosial atau politik dalam skala luas atau sangat lokal. NGO memainkan peran penting dalam mengembangkan masyarakat, meningkatkan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengakses dan menggunakan layanan sistem <i>e-Government</i> .
6	Politisi (<i>politicians</i>)	Politik juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi <i>e-Government</i> . Salah satu isu politik yang dapat berperan dominan dalam pengambilan keputusan adalah <i>political will</i> . Kemauan politik merupakan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam posisi pengambilan keputusan, seperti kepala daerah dalam rangka mengatasi masalah dan kebijakan yang mereka hadapi.
7	Perancang dan Pengembang sistem teknologi informasi (<i>design and IT developers</i>)	Perancang dan pengembang sistem teknologi merupakan salah satu pemain kunci dalam menciptakan inovasi dan layanan sistem <i>e-Government</i> . Peran besar ini tentunya membawa pengaruh sejauh mana sebuah organisasi pemerintah siap dan kuat dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Berdasarkan tipologi pemangku kepentingan sistem *e-Government* seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa masing-masing aktor memiliki peran yang spesifik dan unik untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jika diklasifikasikan lebih ringkas, maka dalam sistem *e-Government* terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) masyarakat, termasuk di dalamnya adalah individu dan warganegara, (2) sektor bisnis, termasuk pelaku

bisnis dan unit usaha kecil dan menengah, dan (3) pendukung atau penyeimbang, termasuk di dalamnya organisasi non-profit, politisi, dan pengembang sistem dan teknologi informasi.

Selanjutnya, ketujuh tipe pemangku kepentingan dalam sistem *e-Government* ini merupakan cikal bakal aktor utama yang memiliki kepentingan dan peran besar dalam pelaksanaan inisiatif OGD. Ketersediaan data pada portal OGD memiliki peran strategis untuk bagaimana ketujuh *stakeholders* ini saling bertukar data dan informasi secara mutualisme.

3.2 Klasifikasi dan Perspektif Peran Pemangku Kepentingan pada OGD

Kemudian, bagaimana dengan tipe, klasifikasi, dan peran pemangku kepentingan pada domain OGD? Pada bagian ini, hasil penelitian dilanjutkan dengan proses iteratif dalam menganalisis konten literatur khususnya pada tema pemangku kepentingan pada OGD dengan mendiskusikan dan mendeskripsikan perspektif. Hasil studi literatur yang dilakukan juga melibatkan analisis terhadap beberapa artikel yang relevan untuk menghasilkan sejumlah perspektif berbeda yang dapat dibawa untuk mendukung data pemerintah terbuka.

Salah satu penggagas klasifikasi pemangku kepentingan dalam OGD adalah F. Gonzales-Zapata dan R. Heeks (2015). Mereka membagi perspektif pemangku kepentingan OGD menjadi empat klaster, yaitu birokrasi, teknologi, politik, dan ekonomi. Penjelasan lebih rinci terkait empat perspektif ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perspektif turunan pemangku kepentingan OGD

No	Perspektif OGD	Peran	Aktor kunci
1	Perspektif Birokrasi	Birokrasi berperan dalam penentuan kebijakan, strategi, dan proses bisnis dalam pemerintahan. Fungsi lain dari birokrasi adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data.	Pegawai negeri sipil, staf teknologi informasi dengan peran operasional.
2	Perspektif Teknologi	Teknologi memiliki peran sentral sebagai media penjamin inovasi teknologi dalam pemerintahan khususnya dalam penyediaan	Staf teknologi informasi dengan peran perancang dan operasional.

No	Perspektif OGD	Peran	Aktor kunci
		dan pengelolaan data.	
3	Perspektif Politik	Secara politis, pemerintah juga memerlukan penyeimbang dan jaminan bahwa layanan sistem dan data dapat diakses secara mudah tanpa syarat untuk kepentingan sektor publik.	Warga negara dengan peran sebagai pengguna
4	Perspektif Ekonomi	Selain untuk kepentingan secara individu, sosial, dan politik, OGD juga harus mampu berperan untuk menciptakan nilai ekonomi dengan basis data yang tersedia.	Sektor bisnis dan swasta, wirausaha, peneliti industri dengan peran sebagai pengguna

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa aspek yang perlu didiskusikan terutama dalam rangka direksi penelitian berikutnya. Pertama, penelitian ini telah berhasil melakukan klasifikasi peran pemangku kepentingan pada domain e-Government dalam bentuk tipologi. Namun demikian, perlu untuk dilanjutkan lagi lebih jauh tipologi yang melibatkan tipe pemangku kepentingan yang lebih banyak. Hal demikian diperlukan untuk melihat secara komprehensif irisan kepentingan dan peran masing-masing *stakeholders* dalam menggunakan layanan *e-Government*. Kedua, penelitian ini juga menghasilkan klasifikasi pemangku kepentingan pemanfaatan OGD melalui perspektif turunan dari klasifikasi e-Government sebelumnya. Tetapi, klasifikasi ini masih bersifat umum dan belum secara khusus melihat peran, minat, dan potensi pro-kontra mereka dalam memanfaatkan OGD.

4. KESIMPULAN

Paper ini menghasilkan tiga poin besar sesuai dengan latar belakang dan pertanyaan penelitian. Pertama, "*bagaimana mendefinisikan pemangku kepentingan OGD?*" Hasil studi literatur dalam penelitian telah mendefinisikan pemangku dalam tiga kasta utama yaitu stakeholder secara umum (internal dan eksternal), stakeholder pada sistem e-Government, dan stakeholder pada sistem OGD. Kedua, "*bagaimana perspektif masing-masing pemangku kepentingan dalam pemanfaatan OGD?*" Hasil kajian teoritis menunjukkan bahwa masing-masing aktor kunci memiliki peran, tujuan, dan minat dalam menggunakan OGD dengan kepentingan beragam. Keberagaman ini mencerminkan bahwa OGD telah

berhasil mengubah bisnis proses pengumpulan dan penggunaan data. Ketiga, "bagaimana mengklasifikasikan peran dan minat masing-masing perbedaan pemangku kepentingan?" Hasil penelitian telah merujuk pada empat klasifikasi perspektif pemangku kepentingan, yaitu birokrasi, teknologi, politik, dan ekonomi.

Dari keempat perspektif pemangku kepentingan (birokrasi, teknologi, politik, dan ekonomi), terhadap implementasi OGD. Maka dapat disimpulkan beberapa hal fundamental. Pertama, masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang sama terhadap kebutuhan akan data, namun disaat yang sama juga berperan berbeda terkait tujuan dalam menggunakan ulang data. Kedua, terlepas adanya perbedaan peran dari keempat perspektif pemangku kepentingan, namun peran sentral pemerintah sendiri dibutuhkan untuk melakukan sinergi hubungan baik antar aktor yang terlibat. Sinergi yang dimaksudkan adalah lebih mengutamakan kepentingan publik dengan memberikan kemudahan akses, keterbaruan data, meloloskan data tanpa syarat, dan memastikan bahwa data memiliki nilai ekonomis untuk inovasi bisnis.

REFERENSI

- [1] S. Bretschneider, "Information Technology, E-Government, and Institutional Change," *Public Administration Review*, vol. 63, no. 6, pp. 738-741, 2003.
- [2] D. Linders, "From E-Government to We-Government: Defining a Typology for Citizen Coproduction in the Age of Social Media," *Government Information Quarterly*, vol. 29, no. 4, pp. 446-454, 2012.
- [3] L. Carter, "E-Government Utilization: Understanding the Impact of Reputation and Risk," *Electronic Government Research*, vol. 8, no. 1, pp. 83-97, 2012.
- [4] L. Horner and L. Hazel, "Adding Public Value, London: The Work Foundation," 2005.
- [5] H. J. Scholl, "Applying Stakeholder Theory to E-government," in *Towards the E-Society*, 2001, pp. 735-747.
- [6] J. Stragier, P. Verdegem, and G. Verleye, "How is e-Government Progressing? A Data Driven Approach to E-government Monitoring" *Journal of Universal Computer Science*, vol. 16, no. 8, pp. 1075-1088, 2010.
- [7] N. Helbig, A. M. Cresswell, B. G. Burke, and L. F. Luna-Reyes, "The Dynamics of Opening Government Data," University at Albany, SUNY, Albany, New York 2012.
- [8] A. Luthfi and M. Janssen, "A Stakeholder Taxonomy for Opening Government Data Decision-making," in *BMSD 2021*, Sofia, Bulgaria, 2021: Springer Nature Switserland AG 2021.

- [9] M. Kamal, V. Weerakkody, and Z. Irani, "Analyzing the role of stakeholders in the adoption of technology integration solutions in UK local government: An exploratory study," *Government Information Quarterly*, vol. 28, no. 2, pp. 200-210, 2011.
- [10] S. D. Mascia, "Managing Difficult Stakeholders," *Project Management World Journal*, vol. 4, no. 9, 2015.
- [11] S. Juana-Espinosa, "Open government data portals in the European Union: A dataset from 2015 to 2017," *Data in Brief*, vol. 29, 2020.
- [12] F. Gonzales-Zapata and R. Heeks, "The Multiple Meanings of Open Government Data: Understanding Different Stakeholders and Their Perspective," *Government Information Quarterly*, vol. 32, pp. 441-452, 2015.
- [13] D. S. Donald and S. Saxena, "Barriers to Open Government Data (OGD) initiative in Tanzania: Stakeholders' perspectives," *Growth and Change*, vol. 50, no. 1, pp. 470-485, 2018.
- [14] A. Giannopoulou, "Understanding Open Data Regulation: An Analysis of the Licensing Landscape," in *Open Data Exposed - Information Technology and Law Series B*. v. L. e. al, Ed.: Springer 2018.
- [15] M. Napolitano, "Open data as a public asset," Digital Commons Lab, Fondazione Bruno Kessler, Trento (Italy) 2019.
- [16] M. Kassen, "A promising phenomenon of open data: A case study of the Chicagoopendata project," *Government Information Quarterly*, vol. 30, pp. 508-513, 2013.
- [17] J. Kučera, D. Chlapek, and M. Nečaský, "Open Government Data Catalogs: Current Approaches and Quality Perspective," in *International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective*, Prague, Czech Republic, 2013, pp. 152-166: Springer.
- [18] M. S. Mayernik, "Open data: Accountability and transparency," *Big Data & Society*, 2017.
- [19] C. Malamud *et al.* (2007, 4 December 2017). *Open Government Data Principles*. Available: https://public.resource.org/8_principles.html
- [20] M. Janssen, Y. Charalabidis, and A. Zuidervijk, "Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government," *Information System Management*, European Research on Electronic Citizen Participation and Engagement in Public Policy Making vol. 29, no. 4, pp. 258-268, 2012.
- [21] P. Carvalho, P. Hitzelberger, B. Otjacques, F. Bouali, and G. Venturini, "Open Data Integration," in *DATA 2014*, 2014, pp. 41-47: ACM Digital Library.
- [22] A. Zuidervijk, M. Janssen, and C. David, "Innovation with open data: Essential elements of open data ecosystems," *Information Polity*, vol. 19, no. 2-3, pp. 17-33, 2014.

- [23] A. Zuiderwijk, "Analysing Open Data in Virtual Research Environments: New Collaboration Opportunities to Improve Policy Making," *Information Polity*, vol. 13, no. 4, pp. 76-92, 2017.
- [24] L. Sunderberg, "Decision Making and Value Realization in Multi-Actor e-Government Context," *Electronic Government and Electronic Participation*, vol. 23, pp. 147-154, 2016.
- [25] M. P. Canares, D. Marcial, and M. Narca, "Enhancing Citizen Engagement with Open Government Data," *Journal of Community Informatics*, vol. 12, no. 2, 2016.
- [26] B. Ubaldi, "Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives," *OECD Working Papers on Public Governance*, vol. 22, p. 60, 27 May 2013 2013.
- [27] A. Zuiderwijk and M. Janssen, "Open Data Policies, Their Implementation and Impact: A Framework for Comparison," *Government Information Quarterly*, vol. 31, no. 1, 2013.
- [28] T. Roeder, *Categorizing Stakeholders* (Managing Project Stakeholders: Building a Foundation to Achieve Project Goals). 2013.
- [29] G. Eliot, *What is a stakeholder?* (Managing Project Stakeholders: Building a Foundation to Achieve Project Goals). 2013.
- [30] J. M. Bryson, "What to Do When Stakeholders Matter," *Public Management Review*, vol. 6, no. 1, 2004.
- [31] M. Heimstädt, F. Saunderson, and T. Heath, "Conceptualizing Open Data ecosystems: A timeline analysis of Open Data development in the UK," in "School of Business & Economics: Management," 2014.
- [32] S. Phonepaseuth and R. Tatyana, "e-Government Implementation," in *MATEC Web of Conference*, Amsterdam, the Netherlands, 2016.
- [33] J. Rowley, "e-Government stakeholders—Who are they and what do they want?," *International Journal of Information Management*, vol. 31, pp. 53-62, 2011.